

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS DI KABUPATEN MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT

Muhammad Ali Akbar

NPP. 30.1575

Asdaf Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat

Prodi Studi Kebijakan Publik

Email. cliao186@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dra. Pratiwi Nurhascaryani, M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Household Waste Management (SRT) and Similar Waste has been regulated in Government Regulation No. 81 of 2012. However, the lack of concern for some people about environmental cleanliness has resulted in waste problems becoming a disease in Indonesia, especially in Mamuju Regency, Province West Sulawesi because people throw garbage carelessly either in rivers, roadsides or in public places. **Purpose:** This study aims to find out and analyze how the implementation of household and similar waste management policies in Mamuju Regency and what are the supporting and inhibiting factors and how efforts are made to implement household and household-like waste management policies. **Method:** In this study the researcher used a qualitative approach. In qualitative research the data collection techniques used are interviews, observation and documentation. **Results/Findings:** Implementation in Mamuju Regency has been going well, the delegation of authority to stakeholders has been carried out properly. The implementation is said to have been going well as evidenced by ongoing socialization regarding the Policy for Household Waste Management and Waste Similar to Waste. The supporting factor is the existence of clear regulations governing waste problems by giving authority to sub-districts as stipulated in Regent Regulation Number 7 of 2021 concerning amendments to Regent Regulation Number 39 of 2018 concerning Regional Policies and Strategies in the Management of Household Waste and similar waste. And the kelurahan's enthusiasm in accepting authority from the Mamuju Regency Environment and Sanitation Service. While the inhibiting factors are the lack of public awareness to dispose of garbage in its place and the lack of discipline of cleaning staff so that it needs to be improved so as not to cause piles of garbage which can become a nest of disease. Efforts were made to overcome the inhibiting factors for implementation in Mamuju Regency, namely improving the available garbage collection vehicles, proposing additional garbage collection fleets to the Mamuju Regency Environmental and Sanitation Service, and inviting the community to work together to maintain cleanliness. **Conclusion:** Implementation in Mamuju Regency has been running well, the delegation of authority to stakeholders has been carried out properly. The implementation is said to have been going well as evidenced by ongoing socialization regarding the Policy for Household Waste Management and Waste Similar to Waste. In carrying out the implementation for environmental hygiene, every morning the cleaning staff comes to pick up trash in every house.

Keywords: Policy Implementation, Waste Management, Household Waste

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang(GAP) : Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 81 Tahun 2012. Akan tetapi Kurangnya kepedulian sebagian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan mengakibatkan permasalahan sampah sudah menjadi penyakit di Indonesia khususnya di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat karena masyarakat membuang sampah secara sembarangan baik di sungai, pinggir jalan atau di tempat umum. **Tujuan** : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis di Kabupaten Mamuju serta apa saja faktor pendukung dan penghambat dan bagaimana upaya dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. **Metode** : Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan** : Implementasi di Kabupaten Mamuju sudah berjalan baik, pelimpahan kewenangan kepada stakeholder sudah dijalankan dengan baik. Implementasi dikatakan sudah berjalan baik dibuktikan dengan sosialisasi yang terus dilakukan mengenai Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah. Faktor pendukung adalah adanya peraturan yang jelas mengatur permasalahan sampah dengan memberikan kewenangan kepada kelurahan yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis. Dan antusiasme kelurahan dalam menerima kewenangan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Mamuju. Sedangkan faktor penghambat adalah kesadaran masyarakat masih kurang untuk membuang sampah pada tempatnyadan kurangnya kedisiplinan petugas kebersihan sehingga perlu ditingkatkan agar tidak menimbulkan timbunan sampah yang bisa menjadi sarang penyakit. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat Implementasi di Kabupaten Mamuju yakni memperbaiki kendaraan pengangkut sampah yang tersedia, mengajukan penambahan armada pengangkut sampah kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Mamuju, serta mengajak masyarakat untuk gotong royong menjaga kebersihan. **Kesimpulan** : Implementasi di Kabupaten Mamuju sudah berjalan baik, pelimpahan kewenangan kepada stakeholder sudah dijalankan dengan baik. Implementasi dikatakan sudah berjalan baik dibuktikan dengan sosialisasi yang terus dilakukan mengenai Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah. Dalam pelaksanaan implementasi guna kebersihan lingkungan, setiap pagi petugas kebersihan datang untuk mengangkut sampah di setiap rumah.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Sampah Rumah Tangga

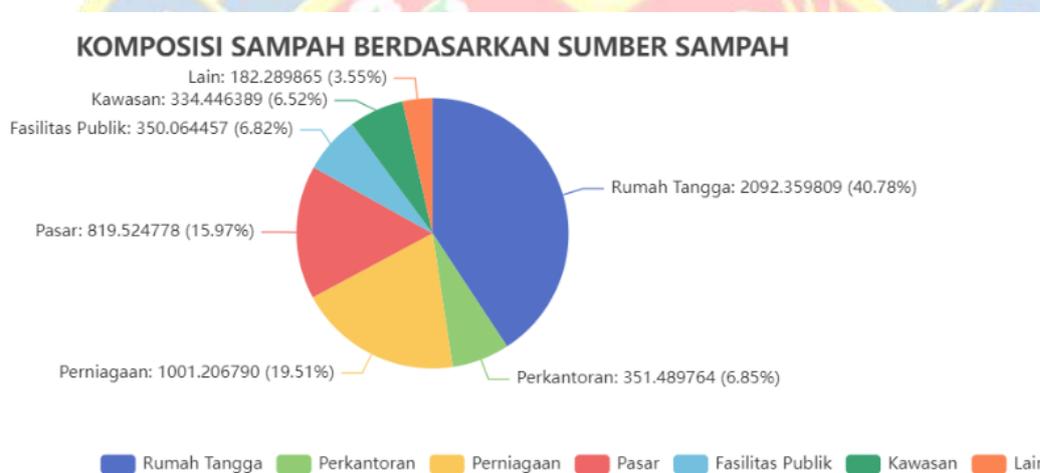
I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan sampah yang kurang baik mengakibatkan pemerintah dan masyarakat harus membangun kerja sama yang baik diantaranya yaitu bergotong royong dalam menanggulangi permasalahan yang sering terjadi akibat sampah. Kurangnya kepedulian sebagian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan mengakibatkan permasalahan sampah sudah menjadi penyakit di Indonesia karena masyarakat membuang sampah secara sembarangan baik di sungai, pinggir jalan atau di tempat umum sehingga sampah menumpuk dan merusak lingkungan. Selain dari bau yang tidak sedap dari sampah tersebut, maka sampah yang dihindangi lalat akan menimbulkan adanya wabah penyakit bagi masyarakat.

Sampah dengan jumlah yang sangat banyak tentu dapat menyebabkan banyak sekali dampak negatif pada masyarakat, terutama dalam bidang kesehatan, seperti penyakit diare, tifus, disentri, jamur, kolera, dan berbagai macam penyakit kulit. Sampah juga dapat menyebabkan polusi air, tanah, dan udara. Ironisnya masih banyak yang belum peduli terhadap persoalan sampah ini. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa 72% masyarakat tidak peduli terhadap sampah dan tidak menganggapnya sebagai tanggung jawab mereka. Padahal jika melihat data-data di atas, dapat dipastikan bahwa kita semua telah berkontribusi terhadap tingginya jumlah sampah di Indonesia. Jika kedepannya masyarakat tidak mau mengubah mindset itu, maka keindahan alam Indonesia akan tertutup oleh sampah. Maka dari itu pemerintah maupun masyarakat secara luas harus mulai bijak dalam pengelolaan sampah. Jumlah penduduk yang banyak memicu terjadinya permasalahan yang ditimbulkan salah satu permasalahan yang sering berlangsung di masyarakat antara lain masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap lingkungan hidup.

Gambar 1



Sumber: SIPSN, 2021

Berdasarkan situs Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), rumah tangga menduduki peringkat teratas sumber sampah dengan angka 40,78% di tahun 2021. Kemudian diikuti oleh perniagaan dengan angka 19,51% dan pasar dengan angka 15,97%. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) sendiri merupakan platform big data yang memiliki fokus pada sampah rumah tangga dan sejenis. SIPSN diluncurkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2021 dengan harapan dapat mendorong kinerja dan membantu masyarakat mengetahui kondisi pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis di Indonesia.

Sampah dengan jumlah yang sangat banyak tentu dapat menyebabkan banyak sekali dampak negatif pada masyarakat, terutama dalam bidang kesehatan, seperti penyakit diare, tifus, disentri, jamur, kolera, dan berbagai macam penyakit kulit. Sampah juga dapat menyebabkan polusi air, tanah, dan udara. Ironisnya masih banyak yang belum peduli terhadap persoalan sampah ini. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa 72% masyarakat tidak peduli terhadap sampah dan tidak menganggapnya sebagai tanggung jawab mereka. Padahal jika melihat data-data di atas, dapat dipastikan bahwa kita semua telah berkontribusi terhadap tingginya jumlah sampah di Indonesia. Jika kedepannya masyarakat tidak mau mengubah mindset itu, maka keindahan alam Indonesia akan tertutup oleh sampah

Kabupaten Mamuju adalah sebuah kabupaten di Indonesia yang menjadi ibu kota Provinsi Sulawesi Barat. Laju pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menunjukkan persentase jumlah pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Jumlah penduduk kabupaten Mamuju baik penduduk asli maupun bukan penduduk asli dalam hal ini ialah perantauan yang menempuh pendidikan juga mencari pekerjaan semakin meningkat secara langsung menyebabkan timbunan sampah yang begitu besar. Hal ini disebabkan karena pola konsumsi masyarakat setempat terjadi perubahan dan menyebabkan volume sampah bertambah, jenis dan karakteristik sampah beragam sehingga permasalahan sampah sampai saat ini tercatat sebagai masalah besar yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Mamuju. Berikut adalah data volume sampah terangkut ke TPA Adi Adi Kabupaten Mamuju:

Tabel 1

Jumlah Volume Sampah Terangkut ke TPA Adi Adi Periode Semester I (Januari-Juni)

Tahun	Jumlah Sampah (ton)
2018	5.234
2019	6.374
2020	5.869
2021	7.544
2022	3.900

Sumber:DLHK Kabupaten Mamuju

Volume sampah yang terbuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebanyak 7.544 ton pada tahun 2021 di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat (Sulbar). Data tersebut didapatkan dari Kepala seksi kebersihan lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Mamuju. Kepala seksi kebersihan lingkungan Kabupaten Mamuju menjelaskan pada tahun 2021 ada sebanyak 7.544 ton yang dibuang di Tpa, yang merupakan hasil sampah warga dan perkantoran masyarakat setempat. Oleh karena itu demi menghasilkan kenyamanan dan kebersihan lingkungan, volume sampah yang dihasilkan harus dikelola dengan baik. Pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama dalam menciptakan kenyamanan dan kebersihan lingkungan.

Pengelolaan sampah yang kurang baik mengakibatkan pemerintah dan masyarakat harus membangun kerja sama yang baik diantaranya yaitu bergotong royong dalam menanggulangi permasalahan yang sering terjadi akibat sampah. Kurangnya kepedulian sebagian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan mengakibatkan permasalahan sampah sudah menjadi penyakit di Indonesia karena masyarakat membuang sampah secara sembarangan baik di sungai, pinggir jalan atau di tempat umum sehingga sampah menumpuk dan merusak lingkungan. Selain dari bau yang tidak sedap dari sampah tersebut, maka sampah yang dihirup lalat akan menimbulkan adanya wabah penyakit bagi masyarakat.

Peraturan Rumah Tangga No. 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis. Dalam pengelolaan sampah rumah tangga secara umum dilakukan dengan mengurangi tingkat kepedulian dari lingkungan rumah tangga itu, memberikan adanya penurunan pada tempat-tempat pembuangan sampah, serta adanya kegiatan yang dapat meningkatkan pelaksanaan proses penegakan hukum terhadap seluruh masyarakat yang melanggar. Beberapa cara dalam mengelola sampah yang dapat dilakukan adalah dengan menyiapkan sebuah perencanaan yang baik terhadap pengelolaan sampah seperti halnya daur ulang, pembakaran, persiapan, pengomposan, dan pembusukan.

Berdasarkan peraturan bupati sebelumnya bahwa pelayanan pengangkutan sampah rumah tangga dalam wilayah yang menjadi kewenangan Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Mamuju Dalam Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis, dalam pelaksanaannya belum maksimal sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan mengembalikan kewenangan kepada perangkat daerah yang membidangi pelayanan persampahan khususnya Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Mamuju

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pengelolaan sampah yang kurang baik mengakibatkan pemerintah dan masyarakat harus membangun kerja sama yang baik diantaranya yaitu bergotong royong dalam menanggulangi permasalahan yang sering terjadi akibat sampah. Kurangnya kepedulian sebagian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan mengakibatkan permasalahan sampah sudah menjadi penyakit di Indonesia karena masyarakat membuang sampah secara sembarangan baik di sungai, pinggir jalan atau di tempat umum sehingga sampah menumpuk dan merusak lingkungan. Selain dari bau yang tidak sedap dari sampah tersebut, maka sampah yang dihindangi alat akan menimbulkan adanya wabah penyakit bagi masyarakat.

1.3 Penelitian Terdahulu

Pertama, Penelitian skripsi oleh Lina Herlina (2014) dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Makassar Dalam Pengelolaan Sampah Di TPA Tamangapa Kecamatan Manggala”. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Makassar dalam Pengelolaan Sampah di TPA Tamangapa Kecamatan Manggala belum maksimal ini terlihat dari belum mencukupinya jumlah armada yang mengangkut sampah dibandingkan dengan jumlah sampah setiap hari yang dihasilkan oleh masyarakat, serta belum memadainya fasilitas lain seperti infrastruktur jalan menuju lokasi TPA sehingga menyebabkan terganggunya mobilitas pengelolaan sampah.

Kemudian penelitian oleh Tirani (2021) dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Dengan Konsep 3r Di Central Komersial Kota Pekanbaru”. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengelolaan pemilahan sampah di Central Komersial Kota Pekanbaru. Implementasi kebijakan pengelolaan sampah dengan konsep 3R dapat berhasil apabila tegasnya sanksi yang diberikan kepada pelaksana yang tidak memenuhi aturan atau instruksi kebijakan, kuatnya koordinasi antara pembuat keputusan, dan masyarakat mengerti hal apa yang harus dilakukan. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam Implementasi kebijakan pengelolaan sampah dengan konsep 3R di central komersial kota pekanbaru adalah Tidak adanya sosialisasi yang dilakukan pemerintah terkait pemilahan sampah kepada masyarakat setempat dengan baik, pihak pemerintah tidak ada melakukan koordinasi kepada masyarakat mengenai iuran retribusi sampah tersebut, kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah, tidak adanya imbalan atau tunjangan dari pemerintah untuk staf atau petugas lapangan pengelolaan sampah. Kesimpulannya tidak tersedianya fasilitas seperti sarana dan prasarana tong sampah 3R, Lemahnya sanksi yang diberikan kepada pelaksana yang tidak memenuhi aturan atau instruksi kebijakan, jumlah staf dikantor dan petugas lapangan memadai, tetapi kualitas dari petugas pengangkut sampahnya masih kurang, pihak Pemerintah tidak ada menyediakan tong sampah 3R, pihak pemerintah tidak ada melakukan koordinasi dengan masyarakat setempat mengenai iuran retribusi sampah. Hendaknya Kepada Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru melalui Unit Pelaksanaan Teknis

pengelolaan sampah perlunya menegakkan sanksi yang tegas kepada pihak-pihak yang terkait, lebih menerapkan kepatuhan atau instruksi dipusat-pusat keramaian mengenai tong sampah 3R, lebih menguatkan koordinasi antar pembuat keputusan atau kebijakan, dan kepada masyarakat, perlunya meningkatkan kesadaran dalam memilah sampah dan menjaga lingkungan agar tidak terjadi penumpukan sampah dimana – mana supaya lingkungan tetap bersih dan sehat.

Penelitian terdahulu yang terakhir adalah penelitian skripsi tahun oleh Fitria Krismansyah (2017) dengan judul “Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara”. Hasil penelitian menunjukkan belum berjalan optimal, karena kurangnya kesadaran pengelola kawasan untuk mengelola sampah secara mandiri, masyarakat cenderung acuh untuk berpartisipasi dalam mengelola sampah hanya mengandalkan petugas kebersihan saja, kurangnya personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk penindakan di setiap wilayah, belum kuatnya payung hukum penindakan dalam Perda ini untuk wilayah Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi maupun di Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan, dan belum adanya Pergub baru yang mengatur penyusunan SPM, serta belum terlaksananya insentif dan disentif karena belum adanya turunan Pergub yang mengatur petunjuk dan pelaksanaannya.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, adapun perbedaan dari ketiga penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan peneliti pada skripsi ini terdapat pada analisis focus dan locus penelitian. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis pertama adalah terletak di fokus penelitian, dimana dalam penelitian sebelumnya ini berfokus pada penanganan semua jenis sampah di TPA dengan locus Kota Makassar. Sedangkan, dalam penelitian yang akan dilakukan penulis berfokus pada pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis (Lina Herlina, 2014).

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis kedua adalah dalam penelitian sebelumnya ini berfokus pada pengelolaan sampah dengan konsep 3R dengan locus Kota Pekanbaru. sedangkan, dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada konsep pengelolaan sampah secara umum (Tirani, 2021). Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ketiga adalah dalam penelitian sebelumnya ini hanya berfokus pada pengimplementasian kebijakan yang ada dalam satu peraturan daerah dengan locus Kota Administrasi Jakarta Utara. Sedangkan, dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berfokus pada beberapa peraturan daerah secara kolektif (Fitria Krismansyah, 2017).

1.5 Tujuan

Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi, faktor yang mendukung dan menghambat, dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi faktor yang menghambat Kebijakan Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis di Kabupaten Mamuju.

II. METODE

Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan oleh peneliti yaitu metode deskriptif. Kemudian peneliti mengaplikasikan penelitian

kualitatif dengan pendekatan induktif yang bersifat penelitian lapangan dikarenakan adanya kesesuaian antara pendekatan induktif dengan penelitian kualitatif. Menurut Harsono (2011:174) menyatakan bahwa pendekatan induktif itu mendasarkan diri pada hal yang bersifat khusus (fakta), kemudian menarik kesimpulan umum apakah sesuai dengan teori, dalil dan hukum yang ada. Analisis teori Implementasi Kebijakan oleh Merilee S.Grindle dengan dimensi Isi Kebijakan dan dimensi Konteks Kebijakan . Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dan data primer. Penelitian kualitatif menggunakan istilah social situation oleh Spradley yang didalamnya terdapat tiga elemen yaitu pelaku, aktivitas dan tempat yang ketiganya saling berinteraksi secara strategis dan tidak lagi menggunakan istilah populasi dalam penelitian ini. Adapun informan pada penelitian ini digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan , Kepala Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasi, Kepala Bidang Kebersihan, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana yang dimana masing masing 1 orang , Petugas Kebersihan 5 orang , dan masyarakat 5 orang . Instrumen penelitian kualitatif yang digunakan adalah pedoman wawancara, observasi dan dokumen. Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, observasi dan dokumentasi. Menurut Simangunsong (2017:228-229) adapun komponen dalam analisi data yaitu: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), verifikasi (*conclusion drawing*)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis di Kabupaten Mamuju

3.1.1 Isi Kebijakan

A. Kepentingan yang mempengaruhi

Kepentingan yang mempengaruhi berkaitan dengan kepentingan - kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan atau program. Dalam indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pengimplementasiannya tentu melibatkan banyak kepentingan serta sejauh mana kepentingan-kepentingan itu mampu membawa pengaruh terhadap implementasinya.

Penulis melakukan wawancara dengan Hamdhan Malik selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Mamuju mengatakan bahwa “Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Bupati Kabupaten Mamuju mencetuskan Kebijakan Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sebagai strategi dalam pengelolaan sampah sehingga Bupati Mamuju memberikan kepercayaan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan.”

Berdasarkan penuturan narasumber dapat disimpulkan bahwa Kebijakan dan Strategi Pemerintah Daerah dalam mengelola sampah rumah tangga dan sampah sejenis juga terdapat kepentingan kelompok sasaran yakni mengharapkan Daerah Kabupaten Mamuju menjadi kawasan yang bersih dari sampah sehingga terlihat indah dan elok. Untuk mengatasi permasalahan kebersihan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju mengajak Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Mamuju sebagai pilar terdepan untuk mensukseskan Kebijakan Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sebagai strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis.

B. Jenis Manfaat

Menurut Marilee S. Grindle mengemukakan bahwa dalam sebuah kebijakan seharusnya memiliki beberapa jenis manfaat yang mampu menunjukkan dampak positif dari hasil implementasi kebijakan atau program yang akan diselenggarakan. Kebijakan yang dirancang Pemerintah baik berupa program, peraturan maupun perundang-undangan dalam pengimplementasiannya harus memberi hasil yang positif juga mengarahkan pada hal yang lebih baik. Menurut Hamdhan Malik selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Mamuju mengatakan bahwa:

“Tujuan dibentuknya kebijakan dalam lingkungan hidup dan kebersihan di Kabupaten Mamuju adalah sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Mamuju.”

Senada dengan yang dikemukakan oleh Hamdhan Malik, Supratman selaku Kepala Bidang Kebersihan Kabupaten Mamuju mengatakan bahwa:

“Tujuan dari kebijakan agar memudahkan pemahaman aparaturnya dan masyarakat Kabupaten Mamuju serta pimpinan daerah dalam menyusun program secara terpadu lingkup OPD dan antar OPD dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Mamuju.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Tujuan dan manfaat kebijakan dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Mamuju merupakan bentuk kreasi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju untuk menjadikan wilayah Kabupaten Mamuju menjadi kawasan yang bersih dengan merujuk kepada tujuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Mamuju Tahun 2021 – 2026.

C. Jangkauan Perubahan

Menurut Marilee S. Grindle berpendapat bahwa setiap kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah memiliki target yang hendak dicapai dan memerlukan skala yang jelas. Setiap kebijakan diharapkan mampu memberikan manfaat jangka panjang dan berkelanjutan. Kebijakan di Kabupaten Mamuju mengharapkan perubahan dan menginginkan untuk menumbuhkan kembali rasa sadar dan cinta lingkungan dalam hal ini adalah kebersihan kepada masyarakat. Dengan adanya Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah diharapkan mampu menjadikan Kabupaten Mamuju sebagai Kabupaten yang tidak hanya bersih namun juga asri sehingga berdampak baik bagi masyarakat serta perubahan yang diinginkan adalah menghantarkan Kabupaten Mamuju meraih penghargaan Adipura.

D. Kedudukan Pengambilan Keputusan

Dalam implementasi kebijakan pengambilan keputusan memiliki peran penting. Maka pada poin ini dijelaskan secara rinci letak pengambil keputusan terhadap kebijakan yang diimplementasikan. Letak pengambil keputusan erat kaitannya dengan stakeholders sebab segala keputusan yang diambil dalam melaksanakan implementasi suatu program harus disesuaikan dengan aturan dan ketentuan yang ada.

Berikut hasil wawancara dengan informan terkait dengan keputusan yang diambil untuk mengatasi masalah pengelolaan kebersihan lingkungan di Kabupaten Mamuju yakni Hamdhan Malik selaku Kepala Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Mamuju berpendapat bahwa:

“Contoh permasalahan yang terjadi pada kebersihan lingkungan ini yaitu pada letak pengambil keputusan, dapat dilihat ketika belum sampai berapa lama pejabat A diberikan wewenang atau

bertanggung jawab untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya namun pejabatnya di ganti lagi misal ke pejabat B, sehingga ini menjadi suatu permasalahan sebab kita baru ingin mempelajari dan mencari solusi serta strategi namun kami diganti lagi sehingga membuat kurang efektif. Namun hal ini kita upayakan agar tidak terjadi pergantian jabatan dalam waktu singkat. Sehingga kedepannya, pejabat yang bertugas dapat memenuhi tanggung jawabnya selama masa periode.”

Disimpulkan bahwa, pengambil keputusan sangat berperan penting dalam setiap program yang dijalankan. Sehingga, stakeholder yang bertanggung jawab pada periodenya bisa fokus membenahi permasalahan lingkungan yang ada di Kabupaten Mamuju.

E. Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program merupakan suatu hal yang ikut berperan aktif dalam suatu kebijakan. Sebab pelaksana program merupakan penggerak atau alat yang digunakan untuk mencapai keberhasilan yang ditetapkan sebelum kebijakan dibuat. Para pelaksana program ini merupakan penyedia dan pemberi pelayanan kepada masyarakat dalam suatu kebijakan.

Kebijakan tersebut membentuk kerja sama kepada seluruh Pemerintah Desa dan masyarakat di Kabupaten Mamuju. Peneliti melakukan wawancara untuk memastikan kebenaran kepada informan terkait kebijakan yang ada dengan Hamdhan Malik selaku Kepala Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Mamuju mengatakan bahwa:

“Para pelaksana atau stakeholder di Kabupaten Mamuju ini tentu Pemerintah dalam hal ini dibawah naungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Mamuju terkhusus pada Bidang Kebersihan dan seluruh jajarannya tidak luput juga dalam hal ini Pemerintah Desa dan Kelurahan dilevel Pemerintah paling bawah serta masyarakat.”

Peneliti melakukan observasi guna memperkuat data terkait hal tersebut ditemukan bahwa masyarakat juga memegang kewajiban terkait pelaksana program yang ada dalam hal ikut berpartisipasi bersama Pemerintah terbilang berpartisipasi. Hal ini dapat diartikan bahwa antara pemerintah daerah dan masyarakat saling bekerjasama.

F. Sumber daya yang disediakan

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan memerlukan dukungan, keberadaan sumber daya yang mampu menyumbangkan energi positif dan berguna untuk menyelesaikan implementasi suatu program tersebut. Dengan adanya sumber daya yang cukup tentu akan membawa dampak yang baik dan sangat membantu di dalam penyelenggaraan suatu program sehingga mampu berjalan dengan maksimal baik serta efektif dan efisien. Sumber daya Manusia (SDM) yang mencukupi dan memiliki kualitas akan membantu pengimplementasian program dengan baik dan lancar. Dalam hal ini SDM yang dibutuhkan ialah memiliki kapasitas yang sesuai serta kemampuan dan kecukupan untuk menyelenggarakan suatu program tersebut. Peneliti melakukan wawancara dengan Supratman selaku Kepala Bidang Kebersihan mengatakan bahwa:

“Sudah ada Lembaga Swadaya Masyarakat yang disiapkan disetiap dusun dalam sebuah desa sebagai penanggung jawab penyelenggaraan namun kenyataanya karena kurangnya kecakapan yang dimiliki oleh para Lembaga Swadaya Masyarakat terkait dengan pengelolaan kebersihan lingkungan, cara mempengaruhi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sehingga kinerja tehitung lemah.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan para Lembaga Swadaya Masyarakat terkait dengan tugas atau amanah yang diberikan kepadanya sebagai pilar

terdepan dalam pelaksanaan kebersihan lingkungan di Kabupaten Mamuju sangat kurang sehingga untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang Lembaga Swadaya Masyarakat yang menjadi petugas sangat tidak maksimal. Ini menunjukkan bahwa pentingnya memberikan pemahaman dan melatih kecakapan seorang Lembaga Swadaya Masyarakat sebelum diterjukan pada masyarakat sehingga bisa bekerja dengan baik.

3.1.2 Konteks Kebijakan (Dimensi ini Terdapat 3 indikator)

A. Kekuasaan, kepentingan dan strategi actor yang terlibat

Menurut Marilee S. Grindle indikator ini juga harus mendapatkan perhatian penuh sebab kepentingan, kekuasaan dan strategi aktor yang terlibat dalam menyukseskan implementasi suatu program. Apabila indikator ini tidak menjadi perhatian maka besar kemungkinan program yang hendak diselenggarakan akan jauh dari harapan

Peneliti melakukan wawancara dengan Hamdhan Malik selaku Kepala Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup dan Pertanahan mengatakan bahwa:

“Masyarakat kita sudah cukup baik dalam hal bersosialisasi ataupun beradaptasi. Hanya saja, dengan kesibukan yang dimiliki setiap orang, membuat masyarakat kita jarang berinteraksi di hari – hari kerja. Kecuali Sabtu dan Minggu kita sering mengadakan agenda gotong royong bersama untuk membersihkan lingkungan sekaligus menjaga silaturahmi yang sudah ada.”

Senada dengan yang dikemukakan oleh Supratman selaku Kepala Bidang Kebersihan di Kabupaten Mamuju mengatakan bahwa:

“Masalah sosialisasi kepada masyarakat memang terbilang belum maksimal, namun sebenarnya kita sudah menentukan Lembaga Swadaya Masyarakat kebersihan sebagai pilar terdepan namun untuk masalah ini berjalan atau tidak tersosialisasikan atau ini dibawah pengawasan Pemerintah Desa atau Kelurahan.”

Berdasarkan wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Mamuju, membenarkan bahwa salah satu permasalahan dalam implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah terletak pada kurangnya partisipasi masyarakat diakibatkan dengan kesibukan yang mereka miliki sehingga pelaksanaan terkait penyampaian sosialisasi kepada masyarakat belum secara menyeluruh. Namun demikian, kebijakan tersebut akan tetap disosialisasikan oleh pemerintah daerah agar lingkungan sekitar terbebas dari sampah.

B. Karakteristik lembaga dan penguasa

Lingkungan merupakan suatu program atau kebijakan diselenggarakan juga memiliki pengaruh terkait keberhasilannya, pada bagian ini dijelaskan terkait karakteristik dari lembaga yang ikut berpengaruh terhadap keberhasilan program atau kebijakan. Berdasarkan wawancara dengan I selaku masyarakat umum mengatakan bahwa “Dari pihak Pemerintah Desa setempat sudah memberikan sepenuhnya pelayanan yang baik, sudah menyediakan tempat sampah disekitaran rumah. Meskipun jumlahnya tidak banyak, tetapi cukup untuk digunakan secara bersama.”

Selain wawancara, dilakukan juga observasi untuk memperkuat data di lapangan sehingga ditemukan bahwa Pemerintah Desa sudah menyediakan sarana walaupun terbilang minim dan sudah berusaha memperbaharui kerusakan sarana yang disediakan sebelumnya, sehingga masyarakat sekitar dapat membuang sampah pada yang telah disediakan.

C. Kepatuhan

Menurut Marilee S. Grindle terkait tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana menjelaskan bahwa dalam proses penyelenggaraan suatu program maka kepatuhan dan daya respon dari pelaksana ialah hal lain yang juga dirasa penting. Sehingga disini poin inti yang hendak dijelaskan yaitu sudah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan di Kabupaten Mamuju.

Dari hasil observasi yang dilakukan, peneliti melihat tingkat respon dari para masyarakat di Kabupaten Mamuju dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Mamuju sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah sudah memberikan pelayanan yang cukup baik kepada masyarakat, dilihat dari tersedianya layanan penjemputan sampah langsung dari tempat pembuangan sampah umum masyarakat ke tempat pembuangan akhir walaupun masih ada sedikit kekurangan yakni dalam segi waktu penjemputan yang tidak terjadwal sehingga biasa mengakibatkan timbunan sampah pada tempat pembuangan umum.

3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Sampah

A. Faktor Pendukung

Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa hal ini merupakan salah satu pendukung tugas yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Mamuju, sehingga masyarakat yang sudah dapat dikategorikan mandiri dalam hal pengelolaan sampah dapat membantu dalam hal pengurangan sampah, tetapi masih ada saja masyarakat yang tidak patuh dan lebih memilih membuang sampah pada TPS liar yang berada dipinggir-pinggir jalan raya sehingga menimbulkan masalah baru.

B. Faktor Penghambat

1. Sarana dan Prasarana

Keterbatasan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Mamuju merupakan penyebab kuat lambatnya proses penanganan masalah sampah di Kabupaten Mamuju. Peneliti mewawancarai 2 (dua) petugas lapangan kebersihan Bapak Ipul (supir) dan Bapak Acci (pengangkut sampah) yang kebetulan sedang membersihkan dan mengangkut sampah di lingkungan kelurahan mamuju mengenai sarana dan prasarana saat ini, pada tanggal 16 Januari 2023 yang mengatakan bahwa :

Terkait sarana dan prasarana khususnya kecamatan mamuju, masih kurang dan banyak fasilitas yang sudah tidak bias dipakailagi seperti serok sampah sehingga kami biasanya mengangkat sampah menggunakan tangan, seperti rumput liar yang sudah panjang mau dipotong namun pemotong rumputnya sudah tidak bias digunakan lagi/rusak sehingga kami pun menggunakan alat manual seperti sabit. Khususnya untuk kendaraan yang kami gunakan baik itu truk atau motor pengangkut sampah kadang- kadang mengalami kerusakan mesin sehingga kami selama beberapa hari tidak mengangkut sampah di beberapa kelurahan diakibatkan kendaraan menjadi penghambat. Kami pun berharap kepada pemerintah kabupaten mamuju khususnya di kecamatan mamuju untuk lebih memperhatikan, memperbaiki atau mungkin membeli dan menambah sarana prasarana di bidang kebersihan agar kami pun dalam melaksanakan pembersihan dapat bekerja dengan benar tanpa masalah serta hambatan yang ada.

Dari hasil pembahasan wawancara di atas terkait sarana prasarana penulis dapat menyimpulkan bahwa perlu adanya perbaikan atau mungkin pembaharuan terhadap fasilitas sarana dan prasarana di bidang kebersihan, dengan adanya masalah tersebut maka para pekerja kebersihanpun mengalami kesusahan saat melaksanakan tugas pekerjaan mereka sehingga juga banyak masyarakat yang menyalahkan dari petugas kebersihan dikarenakan tidak mengangkut sampah selama beberapa hari.

2. Minimnya Kesadaran Masyarakat

Kondisi masyarakat di Kabupaten Mamuju yang sampai saat ini belum mempunyai kesadaran yang penuh dalam pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan menjadi penyebab utama dimana sampah di Kabupaten Mamuju masih belum dapat tertangani secara menyeluruh. Selain itu, perilaku masyarakat yang suka membuang sampah ke saluran atau sungai serta membuat TPS liar disepinggiran jalan semestinya tidak boleh dilakukan karena pada saat ini masyarakat belum menyadari jika hal tersebut masih tetap saja di teruskan maka akan dapat menimbulkan masalah baru yang mengancam lingkungan, masalah yang sekarang diatasi saja tidak kunjung menemui titik terang apalagi jika ditambah oleh masalah-masalah baru yang di munculkan karena kemalasan dan kelalaian dari masyarakat dalam hal pembuangan sampah.

Kepala Bidang Kebersihan Kabupaten Mamuju yakni Bapak Sudirman, S. SP pada Hari Selasa tanggal 10-01-2023 di ruangnya melalui wawancara yang peneliti laksanakan mengatakan bahwa:

Kami sudah berupaya keras dengan apa yang kami punya dan kemampuan kami untuk mengurangi sampah di Kabupaten Mamuju ini, namun memang tidak bisa dipungkiri masih banyak oknum masyarakat apatis yang hanya tahu menggunakan dan membuang sampah seenaknya. Padahal kami sudah menyediakan wadah sampah di tempat-tempat fasilitas umum serta mewajibkan bangunan komersil untuk menyediakan wadah penampungan sampah. Harapannya masyarakat dapat dengan sadar memahami dan mengerti betapa pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian dari lingkungan sekitar karena kita tidak tau masalah atau musibah apa yang akan menanti kita jika tidak peduli terhadap lingkungan

3.3 Upaya Dalam Pengelolaan Sampah

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat Implementasi di Kabupaten Mamuju dalam segi fasilitas yang kurang memadai, pemerintah daerah berupaya untuk memperbaiki kendaraan pengangkut sampah yang tersedia, mengajukan penambahan armada pengangkut sampah kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Mamuju, serta mengajak masyarakat untuk gotong royong menjaga kebersihan. Selain itu juga dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) pada tempat pembuangan sampah yang mendukung dan mendorong masyarakat memiliki disiplin yang tinggi untuk mengurangi masalah lingkungan serta mendukung proses penanganan sampah di Kabupaten Mamuju.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Sampah dengan jumlah yang sangat banyak tentu dapat menyebabkan banyak sekali dampak negatif pada masyarakat, terutama dalam bidang kesehatan, seperti penyakit diare, tifus, disentri, jamur, kolera, dan berbagai macam penyakit kulit. Sampah juga dapat menyebabkan

polusi air, tanah, dan udara. Ironisnya masih banyak yang belum peduli terhadap persoalan sampah ini. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa 72% masyarakat tidak peduli terhadap sampah dan tidak menganggapnya sebagai tanggung jawab mereka. Padahal jika melihat data-data di atas, dapat dipastikan bahwa kita semua telah berkontribusi terhadap tingginya jumlah sampah di Indonesia. Jika kedepannya masyarakat tidak mau mengubah mindset itu, maka keindahan alam Indonesia akan tertutup oleh sampah. Maka dari itu pemerintah maupun masyarakat secara luas harus mulai bijak dalam pengelolaan sampah.

IV. Kesimpulan

1. Implementasi di Kabupaten Mamuju sudah berjalan baik, pelimpahan kewenangan kepada stakeholder sudah dijalankan dengan baik. Implementasi dikatakan sudah berjalan baik dibuktikan dengan sosialisasi yang terus dilakukan mengenai Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah. Sosialisasi diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Mamuju kepada seluruh kelurahan yang dilanjutkan dengan sosialisasi oleh masing – masing kelurahan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan implementasi guna kebersihan lingkungan, setiap pagi petugas kebersihan datang untuk mengangkut sampah di setiap rumah.
2. Faktor pendukung dalam Implementasi Kebijakan ini dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis di Kabupaten Mamuju adalah adanya peraturan yang jelas mengatur permasalahan sampah dengan memberikan kewenangan kepada kelurahan yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis. Selain itu faktor pendukung lainnya adalah antusiasme kelurahan dalam menerima kewenangan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Mamuju. Sedangkan faktor penghambat dalam Implementasi ini adalah kesadaran masyarakat masih kurang untuk membuang sampah pada tempatnya. Selain itu faktor penghambat lain adalah kurangnya kedisiplinan petugas kebersihan sehingga perlu ditingkatkan agar tidak menimbulkan timbunan sampah yang bisa menjadi sarang penyakit.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat Implementasi di Kabupaten Mamuju dalam segi fasilitas yang kurang memadai, pemerintah daerah berupaya untuk memperbaiki kendaraan pengangkut sampah yang tersedia, mengajukan penambahan armada pengangkut sampah kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Mamuju, serta mengajak masyarakat untuk gotong royong menjaga kebersihan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu saja sebagai model studi kasus.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis di Kabupaten Mamuju.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Mamuju beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

V. DAFTAR PUSTAKA

Harsono. 2011. *Etnografi Pendidikan Sebagai Desain Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Simangunsong, Fernandes. 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintahan Teoretik-Legalistik-Empirik-Inovatif*. Bandung: Alfabeta.

Herlina, Lina. 2014. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Makassar Dalam Pengelolaan Sampah Di Tpa Tamangapa Kecamatan Manggala*. Skripsi. Makassar. FISIP. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Krismansyah, Fitria. 2017. *Implementasi PERDA Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara*. Skripsi. Jakarta. FISIP. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Tirani. 2021. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Dengan Konsep 3r Di Central Komersial Kota Pekanbaru*. Skripsi. Pekanbaru. FISIP. Universitas Islam Riau

Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Mamuju Dalam Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis

